

ABSTRACT

BAHGIE MAHTONAMI *Analysis Implementation of Permendikbud Policy No. 28 of 2016 concerning Quality Assurance of Basic and Secondary Education in Medan City (Case Study in the Education Office of North Sumatra Province and Private Vocational Schools). Postgraduate Program in Medan State University Educational Administration Study Program in 2018*

This research is about the implementation of basic and secondary education quality assurance policies carried out by the North Sumatra Provincial Education Office in Medan at the level of Private Vocational High School, based on the theory of George Edward III, which focuses on communication, resources, disposition and bureaucratic structures to test. The research aims to find out how the implementation of the Minister of Education and Culture was carried out by the Education Office. The method of data collection is done by observation and interviews with the head of the department. To check the validity of the data obtained, the study continued by interviewing several heads of Private Vocational Schools. The results of the study showed that the communication process was not carried out socialization and was not scheduled in the official work program. The consistency of the policy implementing staff in communicating to the school principal has not been routinely implemented, meaning that the socialization of this policy is not scheduled by the education office routinely. Quantitatively, the number of policy implementers is still less than the staff workload. Dispositions that have been carried out include information submitted from the Head of the Office to official staff in terms of providing information, even though the information provided is not yet fully controlled by staff in the Education Office. In implementing the policy, the Education Office does not yet have a clear organizational structure related to the quality assurance team, and internal coordination in the implementation of the policy has not run well and external coordination between the Education Office and school principals is still ineffective because there is no budget for implementing this policy.

Keywords: *Policy implementation, education quality assurance*

ABSTRAK

BAHGIE MAHTONAMI Analisis Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kota Medan (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dan SMK Swasta). Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Administrasi Pendidikan tahun 2018.

Penelitian ini tentang implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan pada jenjang SMK Swasta, dengan berpatokan pada teori George Edward III yakni berfokus pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi untuk menguji. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi permendikbud tersebut dilakukan dinas Pendidikan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan kepala dinas. Untuk mengecek keabsahan data yang didapat maka penelitian dilanjutkan dengan mewawancarai beberapa kepala SMK Swasta. Hasil penelitian menunjukkan proses komunikasi tidak dilakukan sosialisasi dan tidak terjadwal dalam program kerja dinas. Konsistensi staf pelaksana kebijakan dalam mengkomunikasikan kepada kepala sekolah belum dilaksanakan rutin, maksudnya sosialisasi kebijakan ini tidak diagendakan oleh dinas pendidikan secara rutin. Secara kuantitas jumlah pelaksana kebijakan masih kurang jika dibandingkan beban kerja staf. Disposisi yang sudah dilakukan antara lain informasi yang disampaikan dari Kepala dinas kepada pegawai dinas dalam hal pemberian informasi, walaupun informasi yang diberikan belum sepenuhnya dikuasai oleh staf yang ada di dinas Pendidikan. Dalam implementasi kebijakan, Dinas Pendidikan belum memiliki struktur organisasi yang jelas terkait tim penjaminan mutu, dan koordinasi internal dalam pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan dengan baik dan koordinasi eksternal antara Dinas Pendidikan dengan kepala sekolah masih berjalan kurang efektif dikarenakan belum ada anggaran dana untuk implementasi kebijakan ini.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, penjaminan mutu pendidikan

